

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI 1 DESA SINGURA KECAMATAN TORIBULU KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Riski Hayatullah Pontoh^{1*}, Mohamad Tofan Samudin², Fery³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi: riskipontoh653@gmail.com

ABSTRAK

Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 1 Desa Singura Kecamatan Toribulu merupakan salah satu sekolah yang menerima penyaluran dana Bos tersebut dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan jumlah siswa pada tahun januari – desember 2018 sebanyak 117 siswa. Rincian alokasi dana BOS untuk satuan SMP Satap Negeri 1 Desa Singura sebesar Rp 29.250.000 dalam waktu triwulan I sampai IV tahun 2018 dari jumlah siswa 117. Sedangkan Jumlah total sepanjang tahun adalah Rp 117.000.000. dalam penelitian ini tipe penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan peneliti sebanyak 6 orang. Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana BOS di Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 1 Desa Singura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong belum sepenuhnya berjalan dengan baik dengan tujuan program BOS, meskipun aspek faktor lingkungan yang baik dari berbagai stakeholder.

Kata Kunci : Transparansi, Dana Bantuan Operasional Sekolah

ABSTRACT

One Roof State Junior High School 1 Singura Village, Toribulu Sub-district is one of the schools that received the distribution of the Boss funds from the Central Sulawesi Provincial government, with a total of 117 students in January – December 2018. The details of the allocation of BOS funds for the SMP Negeri 1 Singura Village are IDR 29,250,000 in the first to fourth quarters of 2018 from a total of 117 students. While the total amount for the whole year is IDR 117,000,000. in this study the type of research is descriptive qualitative research, while the data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Research informants as many as 6 people. Data were analyzed by qualitative analysis techniques. The results showed that the transparency of the management of BOS funds at the One Roof State Junior High School 1 Singura Village, Toribulu District, Parigi Moutong Regency had not fully worked out well with the objectives of the BOS program, despite the good environmental factors from various stakeholders.

Keywords: Transparency, School Operational Assistance Fund

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan dewasa ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan terutama oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas yang hanya dapat dihasilkan lewat pendidikan yang berkualitas pula (Fery 2016)

Pendidikan di Indonesia telah di laksanakan dengan adanya beberapa kebijakan tentang pendidikan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat. Di antaranya adalah UUD 1945, UU sistem pendidikan nasional, standar pelayanan minimum dan salah satunya adalah standar pembiayaan.

Pemerintah dalam menerjemahkan amanat UUD 1945 tersebut mengeluarkan berbagai kebijakan dalam pengembangan pendidikan yang di buat sejak tahun 2004 samapai saat ini. Seperti peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan (9) Tahun yang bermutu serta pemberian akses yang lebih kepada kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu menjangkau pendidikan yang layak. "Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga Negara tanpa diskriminasi"

Undang-Undang No 20 Tahun 2003. Sisdiknas, Pasal 11 ayat 1). Konsekuensinya pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun (pasal 1 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa di pungut biaya karena pendidikan dasar adalah tanggung jawab Negara yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana di atur dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) serta dan anggaran pendapatan dan Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Sumber pendanaan pendidikan di tentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Dalam hal ini konsep pendidikan untuk semua (*Education for all*) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap individu untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan potensi siswa. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan

zaman, sekolah bermutu di dominasi oleh siswa dari keluarga mampu. Siswa miskin yang mempunyai minat dan potensi kurang mempunyai kesempatan belajar di sekolah bermutu serta menutup kesempatan mereka untuk merubah nasib dan status sosialnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk memecahkan masalah pemerataan pendidikan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu, yang mendapat alokasi dengan anggaran cukup besar dengan Anggaran Operasional Sekolah atau di kenal dengan BOS. BOS Merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya Operasional nonpersonalia sekolah.

Dana BOS yang di terima oleh sekolah dan di kelolah secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru, komite sekolah dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) (PERMENDIKBUD,2013) salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah transparansi pengelolaan dana dan segala sumber daya yang ada dalam program BOS. Pentingnya transparansi pengelolaan dan BOS diharapkan akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien hal ini sejalan dengan ungkapan Dasril (2015) yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dari segi pelaksanaannya di SMP Satu Atap Negeri 1 Desa Singura Kecamatan Toribulu, walaupun telah ada pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pengelolaan dan BOS, tetapi masih di temukan terjadinya keterlambatan penyaluran dana, penggunaan dana yang tidak tepat sasaran serta pencatatan yang tidak tertib atas penggunaan dana BOS, termaksud ketidaktertiban penggunaan dan yang di kelolah oleh Tim Manajemen BOS tingkat sekolah. Sedangkan dari segi pelaporan dan evaluasi juga masih di temukan beberapa permasalahan, seperti pelaporan penggunaan dan BOS yang di susun oleh sekolah di laksanakan secara tidak tertib serta pihak sekolah yang tidak secara transparan mengumumkan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah.

SMP Satu Atap Negeri 1 Desa Singura Kecamatan Toribulu merupakan salah satu sekolah yang menerima penyaluran dana Bos tersebut dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan jumlah siswa pada tahun januari – desember 2018 sebanyak 117 siswa. Rincian alokasi dana BOS untuk satuan SMP Satap Negeri 1 Desa Singura sebesar Rp 29.250.000 dalam waktu triwulan I sampai IV tahun 2018 dari

jumlah siswa 117. Sedangkan Jumlah total sepanjang tahun adalah Rp 117.000.000.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang di gunakan adalah dasar penelitian grounded Research. Karena dasar penelitian ini dari level fakta (empiric), dan dari fakta empiric tanpa teori bergerak menuju level konseptual. Teknik penentuan informan sebagai sumber data peneliti dengan menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dengan cara *purposive* melakukan Wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan transparansi Bantuan Operasional Sekolah Di SMP Satap Negeri 1 Desa Singura. Maka dalam analisis data selama di lapangan peneliti menggunakan model *spradley* yaitu teknik analisa data yang di sesuaikan dengan tahapan dalam penelitian yaitu :

1. Pada tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data *grand tour* *qustion* yakni pertama, dengan memilih situasi sosial (*place, actor, activiti*)
2. Kemudian setelah memasuki lapangan, di mulai dengan menetapkan seseorang informan "*key informant*" yang merupakan informan yang berwibawa dan di percaya mampu

"membukakan pintu" kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu perhatian peneliti pada obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, di lanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Berdasarkan hasil dari analisis wawancara selanjutnya peneliti melakukan analisis domain.

3. Pada tahap menentukan fokus (di lakukan dengan observasi terfokus). Analisa data di lakukan dengan analisis taksomoni (pengelompokan berdasarakan tingkatan).
4. Pada tahap selection (di lakukan dengan observasi seleksi) selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kintras, yang di lakukan dengan analisis komponensial.
5. Hasil dari analisis komponensial, melalui analisis tema peneliti menemukan tema-tema baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna membahas tentang transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah maka mengukur dengan indikator sebagai berikut :

Informatif (*Invormativeness*)

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan Ulfa menyatakan bahwa :

Selama ini Tranparansi yang di lakukan oleh sekolah SMP Satap Negeri 1 Desa Singura berjalan baik dan penyalurannya di lakukan sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, dan semuanya digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang terprogramkan". (Hasil wawancara 22 Januari 2020 pukul 12.30 s/d 12.50 wita).

Berikut hasil wawancara dengan Alfania Kartika Putri mengatakan bahwa :

Saya tidak tahu tentang bagaimana proses atau mekanisme Penyaluran dan pengelolaan Dana BOS. Yang pasti karena adanya Dana BOS kami bisa mendapatkan beberapa buku cetak".(Hasil wawancara 29 Januari 2020 pukul 11.00-11.30 wita).

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa siswa maupun orang tua siswa sendiri yang merupakan target ataupun sasaran dari kebijakan tidak mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dan pengelolaan dari dana BOS tersebut. Bagi mereka adalah bukan mekanismenya yang utama tapi bagaimana mereka merasakan dampaknya.

Seiring dengan pernyataan yang dilakukan dengan Zulkaidah menyatakan bahwa :

Sudah seharusnya pihak sekolah melakukan upaya tranparansi pengelolaan Dana BOS sudah jelas dan sesuai dengan prosedurnya, Tranparansi yang di maksud yaitu memberikan sebuah pemaparan kepada seluruh anggota tenaga kerja yang bertugas di Sekolah sehingga tidak menimbulkan rasa kecurigaan yang terjadi antar sesama para tenaga kerja yang bertugas di sekolah SMP Satap Negeri 1 Desa Singura. Selanjutnya Dana BOS di

programkan menjadi sebuah kebutuhan-kebutuhan sekolah yang mendasar sebut saja perlengkapan alat olahraga dan perlengkapan ATK". (Hasil wawancara 22 Januari 2020 pukul 11.00 s/d 11.30 Wita).

Jika interaksi sekolah secara internal dan eksternal khususnya dengan dinas berjalan dengan baik, hal ini berbeda dengan siswa dan orang tua siswa. Dimana interaksi yang di bangun tidak sebaik dengan internal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Zulkaidah menyatakan bahwa :

Selama ini, pengelolaan dana BOS di sekolah ini baik-baik saja, sebab Kepala Sekolah selalu mengkomunikasikannya dengan bagus dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal ini disampaikan pula oleh Bendahara BOS dalam laporannya. Sehingga kami para guru juga mengetahui penggunaan dana BOS tersebut".(Hasil wawancara 22 Januari 2020 pukul 12.30 s/d 12.50 wita).

Menurut Ulfa mengatakan bahwa :

Pola interaksi yang dibangun yaitu bersifat dua arah yakni interaksi internal dan eksternal. Dalam hal ini interaksi internal di jalankan dengan bagus sesuai dengan tupoksi masing-masing serta disampaikan dengan transparan. Interaksi internal yaitu dimana selama ini dalam setiap pembahasan BOS di dinas Pendidikan, sekolah selalu dipanggil bendahara dan operator sekolah. Dan menurut saya bahwa komunikasi dan interaksi yang dilaksanakan selama ini berjalan dengan bagus".(Hasil wawancara 22 Januari 2020 pukul 12.30 s/d 12.50 Wita).

Berdasarkan pernyataan tersebut menyatakan bahwa kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS membangun dua arah interaksi yakni interaksi secara internal maupun eksternal. Dimana masing-masing pihak yang ada dalam lingkup sekolah yakni pengelolaan dana BOS dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Selain itu juga interaksi yang dibangun tidak cukup di internal tapi juga eksternal. Dalam hal ini adalah dengan dinas terkait. Dimana dalam setiap pembahasan tentang BOS dinas pendidikan dan kebudayaan selalu melibatkan pihak sekolah.

Jika interaksi sekolah secara internal dan eksternal khususnya dengan dinas berjalan dengan baik, hal ini berbeda dengan siswa dan orang tua siswa. Dimana interaksi yang dibangun tidak sebaik dengan internal.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Santi menyatakan bahwa :

Semua dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah kepada pelaksana kegiatan dan Bendahara BOS berdasarkan program sekolah yang sudah direncanakan dan disepakati oleh dewan Guru dan Komite Sekolah".(Hasil wawancara 22 Januari 2020 pada pukul 12.30 s/d 12.50 Wita).

Dari pernyataan di atas membuktikan bahwa Kepala Sekolah menjalin interaksi dengan guru-guru dan orang tua Siswa tentang bantuan Dana

BOS. Interaksi yang dibangun oleh Kepala sekolah yaitu mensosialisasikan dana BOS kepada orang tua siswa lewat rapat komite sekolah. Dalam penggunaan dana BOS, Kepala sekolah sendiri mengelola dana BOS untuk keperluan-keperluan yang menunjang proses belajar-mengajar yang dituangkan dalam RKAS atau program sekolah yang telah disepakati oleh Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Pola interaksi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru-guru dan orang tua siswa serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah satu strategi Sekolah membangun komunikasi yang baik antara internal dan eksternal sekolah sendiri. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah SMP Satap Negeri 1 Desa Singura.

Keterbukaan (*Openness*)

Sama halnya dengan Alfanisa Kartika mengatakan bahwa :

Kami mengetahui adanya dana BOS disekolah ini, itu kami tahu karena disampaikan oleh guru-guru, Masalah pengelolaan dan penggunaan dana BOS kami tidak tahu. Yang kami tahu dana BOS hanya digunakan untuk membeli buku catok saja".(Hasil wawancara 29 Januari 2020 pukul 11.00-11.30 wita).

Dari pandangan di atas mengatakan bahwa sesungguhnya pihak dalam mengimplementasikan dana BOS tersebut kurang membangun hubungan yang intensif dengan pihak orang tua siswa dan

siswa sendiri. Ini dapat kita ketahui, dimana orang tua siswa dan siswa sebagai target sasaran tidak terlalu memahami dana BOS. Tanpa mengetahui tentang jumlah dan pengelolaannya.

Oleh sebab itu, pola interaksi yang dibangun oleh tim manajemen BOS Sekolah atau Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab BOS sekolah yang bertugas untuk mensosialisasikan dana BOS kepada guru-guru dan orang tua siswa serta siswa sendiri belum berjalan sepenuhnya dengan baik. Dimana orang tua siswa dan siswa sendiri belum memahami program BOS, serta tidak mengetahui tentang pencairan maupun pengelolaan dana BOS di sekolah SMP Satap Negeri 1 Desa Singura.

Berikut hasil wawancara dengan Nurlian mengatakan bahwa :

Kami selaku orang tua siswa perlu juga untuk mengetahui penggunaan anggaran Dana BOS. Karen selama ini pihak sekolah belum pernah memberitahukan kepada kami tentang Dana BOS tersebut. Oleh sebab itu saya rasa perlu adanya Transparansi anggaran tentang Dana BOS tersebut". (Hasil wawancara 28 Januari 2020 pukul 09.30 s/d 10.00 Wita).

Seharusnya Tim manajemen BOS sekolah bertugas untuk membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah, memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, dan mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah

juga dengan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditanda tangani oleh kepala sekolah, bendahara BOS dan komite sekolah, serta mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman.

Selain itu tim manajemen BOS berkewajiban untuk menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport.

Oleh sebab itu, tim Manajemen BOS sekolah di SMP Satap Negeri 1 Desa Singura dalam pengelolaan dana Bos belum sepenuhnya berjalan Sesuai dengan Standart Operasional Pelaksana (SOP) penggunaan BOS. Dimana tim Manajemen BOS sekolah belum menjalankan tugasnya sepenuhnya sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam petunjuk teknis BOS tahun 2018. Salah satunya yaitu tentang Transparansi Penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa dan pengumuman penggunaan dana BOS tersebut belum di tempel Di Papan Pengumuman Sekolah.

Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus di pahami oleh semua pihak baik itu orang tua/masyarakat dan siswi-siswi serta para pengelola. Sebab itu, dibutuhkan sosialisasi, sebuah interaksi yang baik agar para kelompok sasaran dapat

terangsang untuk melaksanakannya. Hal ini agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pengelola dana BOS dengan penerima BOS sendiri. Karenanya perlu kejelasan yang harus disampaikan sampai tuntas mulai dari keberadaan. Pencairan anggaran serta kegunaan dan pengelolaan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. Secara khusus BOS bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD, SMP Negeri terhadap biaya operasi sekolah kecuali terhadap RSBI dan SBI. Membebaskan bentuk pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah Negeri maupun Swasta. Dan meringankan biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Adapun mekanisme proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan dua tahap, yaitu :

Tahap 1 : Penyaluran dana dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi. Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Tahap 2 : penyaluran dana dari KUD provinsi ke rekening sekolah. Mekanisme penyakuran dana dan pelaporannya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Untuk kelancaran penyaluran dana BOS, ada beberapa tahapan/langkah persiapan yang harus di lakukan.

- 1) Bagi sekolah yang belum memiliki rekening, misalnya sekolah baru, maka sekolah harus segera membuka rekening bank atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi) dan segera mengirim ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
- 2) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengompilasi nomor rekening seluruh sekolah dan nomor rekening baru (jika ada), kemudian mengirimkannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi (Formulir BOS-02);
- 3) SKPD (Surat Keputusan Pemerintah Daerah) Pendidikan Provinsi dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani naskah hibah, yang prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- 4) SKPD (Surat Keputusan Pemerintah Daerah) Pendidikan Provinsi menyerahkan data daftar sekolah penerima dana BOS dan alokasi dananya kepada BPKD (Badan Pemeriksa Keuangan Daerah) untuk

keperluan pencairan dana BOS dari KUD ke sekolah.

Dalam petunjuk teknis program BOS tahun 2018 sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 80 (SD/SDLB) dan 120 (SMP/SMPLB/Satap) BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan ketentuan untuk SD/SDLB: Rp. 580.000,-/peserta didik/tahun, dan SMP/SMPLB/Satap: Rp. 1000.000,-/peserta didik/tahun.

SMP Satap Negeri 1 Desa Singura merupakan salah satu sekolah sasaran dari program BOS. Dimana SMP Satap Negeri 1 Desa Singura dengan jumlah siswa pada tahun ajaran 2017-2018 adalah 117 orang dan tahun ajaran 2018-2019 adalah sebanyak 138 orang. Oleh sebab itu melihat data di atas setiap siswa diperkirakan akan mendapat Rp. 250.000/Triwulan, dalam setiap pencairan dana BOS. SMP Satap Negeri 1 Desa Singura dengan jumlah siswa di atas akan mendapat dana BOS pada tahun ajaran 2017-2018 adalah Rp. 117.000.000 dan pada tahun Ajaran 2018-2019 adalah sebanyak Rp. 138.000.000.

Dana BOS bagi daerah tidak terpencil disalurkan dari KUN dan KUD secara Triwulan (Tiga Bulanan), yaitu :

- 1) Triwulan Pertama (bulan Januari-bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada bulan Januari 2018;
- 2) Triwulan Kedua (bulan April-bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan April 2018;
- 3) Triwulan Ketiga (bulan Juli-bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2018;
- 4) Triwulan Keempat (bulan Oktober-Bulan Desember) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Oktober 2018.

Dalam petunjuk teknis BOS 2018, program BOS dan Manajemen berbasis sekolah menjelaskan bahwa BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS.

Oleh karena itu, program BOS di SMP Satap Negeri 1 Desa Sigura sangat didukung keberadaannya oleh orang tua siswa dan siswa sendiri serta guru-guru. Karena program BOS sangat bermanfaat dalam pembiayaan berbagai keperluan yang menunjang terwujudnya wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

KESIMPULAN

Peneliti menarik kesimpulan 1. Informatif. Bahwa segala sesuatu yang bersifat memberi informasi atau menerangkan. Melalui media atau apapun bentuknya jika dapat memberikan informasi dan bisa dengan mudah dipahami maka itu bisa di katakan informatif. 2. Keterbukaan (*Openness*) Pola interaksi yang di bangun oleh pihak Manajemen BOS sekolah yang bertugas untuk mensosialisasikan Dana BOS, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana orang tua siswa dan siswa belum memahami dan mengetahui dengan jelas Rincian penggunaan Dana BOS tersebut.

Tentang *Pedoman Umum Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013*.

Rasul, Syahrudin. (2002). *Pengintegrasian system Akuntabilitas kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. PNRI. Jakarta

Soewartojo, Junaidi. (1986) *Keuangan Negar*. STIA-LAN. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *system Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solihin. 2005. *Analisis kebijakan: dari Formulasi ke Implementasin Kebijaksanaan Negara*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Dasril Muhamad, 2014, *Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Palu Timur Kota Palu* Jurnal Prospektif Fakultas ISIP Universitas Muhammadiyah Palu Volume 1 No 1, Hal 47-74.

Dunn, William, N.2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Hanindita Graha Widya. Yogyakarta.

Fery, 2016 *Pola Manajemen Dalam Realisasi Program Pusat Sumber Belajar (PSB) Di SMA Negeri 6 Palu*. Jurnal Prospektif Fakultas ISIP Universitas Muhammadiyah Palu Volume 1 No 3, Hal 1-14.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. CV. Alfabeta. Bandung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang *Pendanaan Pendidikan*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 246/PMK.7/2012